

RENCANA KERJA TAHUN 2025



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)
KABUPATEN BARRU

Jalan H. A. Iskandar Unru Nomor 2 Kabupaten Barru 90712



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI BARRU

NOMOR : 404/BAPPELITBANGDA/XI/2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARRU,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur mengenai penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

A. Ketua

1. Membimbing Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
3. Melaporkan hasil kerja tim baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati.

B. Sekretaris

1. Menghimpun dan menginventaris penyelenggaraan administrasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
3. Menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. Kelompok Kerja

1. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data informasi yang berhubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Membantu pelaksanaan tugas ketua dan sekretaris dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
3. Melaksanakan tugas administrasi lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 November 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, di Barru;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Barru, di Barru;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR:404/BAPPELITBANGDA/XI/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

I. Sekretariat Daerah

Ketua Tim : Sekretaris Daerah Kabupaten Barru

Sekretaris Tim : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Barru

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi

1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Barru
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Barru
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Barru
4. Sarmiati Burhanuddin, SH, M.Pd. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bag. Kesra)
5. Syahriadi, S.Hi. MA Bag. Kesra Setda Barru (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bag. Kesra)
6. Ahmad, S. Ag Bag. Kesra Setda Barru (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bag. Kesra)
7. Idalal, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bag. Organisasi)
8. Saaduddin H.Wahid, S.IP (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bag. Organisasi)
9. Fadli Darmis, S.Si (Perencana Ahli Pertama Bag. Organisasi)
10. Nur'asmi. B, S.Sos (Staf Bag. Organisasi)
11. Dewi Susanti (Staf Bag. Pemerintahan)
12. Ariyani Arifin, A.Md (Staf Bag. Kesejahteraan Rakyat)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Barru
2. Kepala Bagian Hukum Setda Barru
3. Isma Kurniaty Muslimin, SH. MH (Penyuluh Hukum Ahli Muda Bag. Hukum)

4. Andi Roswati Daeng Sanga, SH. M.A.P (Analisis Hukum Ahli Muda Bag. Hukum)
5. Muddatsir Hasan, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bag. Hukum)
6. Anni Sari, ST, M.A.P (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bag. Pengadaan Barang dan Jasa)
7. Rahman Judriah, ST. M.Eng (Kasubag. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Bag. Pengadaan Barang dan Jasa)
8. Alamsyah Rahim (Staf Bag. Hukum Setda Barru)
9. Andi Khaerana Riyu, A. Md (Staf Bag. Pengadaan Barang dan Jasa)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Barru
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Barru
3. Reza Syahrial, S.STP, M.M (Kasubag. Protokol Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan)
4. Hj. Sri Musfirah, S. Pt Bag. Perekonomian dan SDA (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bag. Perekonomian dan SDA)
5. Sitti Aminah Tang, S.Sos, M.A.P (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bag. Perekonomian dan SDA)
6. Hamka, S.IP (Staf Bag. Perekonomian dan SDA)
7. Andi Marwati (Staf Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)
8. Hendrayani (Staf Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Barru
2. Kepala Bagian Umum Setda Barru
3. Gunawan Wibisono, S.Kom., M.M (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bag. Adm. Pembangunan Setda Barru)
4. Bhisma Setya Laksana A, SM., M.M (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bag. Adm. Pembangunan Setda Barru)
5. Haeriah, S.M.,M.M. (Kasubag. Keuangan Bag. Umum)
6. Mirwan, S.Sos.,M.M. (Kasubag. Rumah Tangga Bag. Umum)
7. Rapika, S.M. MM (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah, Staf Ali Dan Kepegawaian Bag. Umum)
8. Wahyuddin L. , S.Sos (Staf Bag. Umum Setda Barru)

II. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ketua Tim : Sekretaris DPRD

Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian
2. Rio Darmawan, S.E (Analisis Perencanaan Ahli Muda)
3. Andi Majjajareng, S.Sos (Analisis Kinerja)
4. Syamsuriani, S.Sos (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)

B. Telaahan Kebijakan

1. Farid Muhiddin, S.E (Analisis Keuangan Pusat Ahli Muda)
2. Suriani, S.Sos (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan)
3. Andi Fadli Hasan, S.E (Analisis Keuangan)
4. Herry Hermawan (Pengurus Barang)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Abdu Haris, S.Sos, M.M, (Perisalah Legislatif Ahli Muda)
2. Nurliah, S.H, M.H (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda)
3. Nurlinda, S.Sos (Penyusun Risalah)
4. Amir Page (Pengadministrasi Umum)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
2. Kepala Bagian Fasilitas Pengawasan dan Penganggaran
3. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
4. Muhammad Syihabuddin, S.E (Analisis Keuangan)

III. Inspektorat

Ketua Tim : Inspektur Inspektorat

Sekretaris Tim : Sekretaris Inspektorat

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi
2. Herman Usman, ST. (PPUPD Madya)
3. Lirzam Zalmar, ST. (PPUPD Pertama)
4. Amirulbahar, SH (Auditor Ahli Pertama)

B. Telaahan Kebijakan

1. Inspektur Pembantu Wilayah III
2. Musfira, SH. (PPUPD Muda)
3. Nurliah, S.Psi (PPUPD Muda)
4. Mentari Chendrakasih Putra Mantong, ST. (Auditor Ahli Pertama)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Inspektur Pembantu Wilayah II
2. Rahmah Maghfirah, S.Psi.,MM. (PPUPD Madya)
3. Kurnia, S.Sos (PPUPD Muda)
4. Hj. Hural Aeni, S.Si (PPUPD Muda)

D. Rencana Kerja

1. Inspektur Pembantu Wilayah I
2. Firmansyah, S.Sos.,M.Si (Auditor Ahli Madya)
3. Azmiyah, S.Sos.,MM (PPUPD Madya)
4. Hj. A. Melany Permatasari, S.Sos.,MM. (PPUPD Muda)

IV. Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ketua Tim : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sekretaris Tim : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Diklat, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Galih Wijayanto, S.M. (Analisis Keuangan)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2. Kepala Bidang Diklat, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Kepala Subbagian Umum dan SDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

V. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sekretaris Tim : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
2. Khaerul Anwar S., SE (Fungsional Perencana)
3. Gunawam Parenrengi D., ST (Fungsional Perencana)
4. Musmualim, S.Sos (Bendahara)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM
3. Junaidi, ST (Fungsional Peneliti)
4. Fitrisandi, S.Kom (Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. Kepala Subbagian Keuangan
3. Nurmalasari, S.S., M.M (Fungsional Perencana)
4. Akhiruddin Kadir, SE (Fungsional Perencana)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Kepala Subbagian Program
3. A. Arsidi, S.Si., M.A.P. (Fungsional Perencana)
4. Nimah Z. Hamid, S.Sos (Pengelola Program dan Kegiatan)

VI. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Ketua Tim : Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Sekretaris Tim : Sekretaris Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
2. Kepala Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
3. Kepala Subbidang Akuntansi Aset
4. Kepala Subbagian Keuangan
5. Hj Nurtina, S.Sos (Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Aset Daerah
2. Kepala Subbidang Penggunaan, Pemusnahan dan Penghapusan
3. Kepala Subbidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
4. Ida Farida, SE (Fungsional Analisis Kebijakan)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Perbendaharaan Daerah
2. Kepala Subbidang Perbendaharaan
3. Kepala Subbidang Kas Daerah
4. Kepala Subbagian Umum dan Sumber Daya Manusia
5. Rosmijati, SE (Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah)
6. Sitti Rahma, SE.,M.Si (Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
2. Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran
3. Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Analisis Anggaran
4. Kepala Subbagian Penyusunan Program
5. Idham Haris, S.Kom (Fungsional Pranata Komputer)
6. Harianto (Pelaksana Pengadministrasi Perencana dan Program)

VII. Badan Pendapatan Daerah

Ketua Tim : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Sekretaris Tim : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah

2. Kepala Subbid Penagihan, Keberatan dan Penindakan Badan Pendapatan Daerah
 3. Kepala Subbid Sarana dan Prasarana Benda Berharga Badan Pendapatan Daerah
 4. Nurul Haq Arma Putra (Fungsional)
 5. Harlina (Pengadministrasi Penataan Sarana dan Prasarana)
 6. Muhammad Sopyan (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah)
- B. Telaahan Kebijakan
1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah
 2. Kepala Subbid Hukum dan Perundang-Undangan Badan Pendapatan Daerah
 3. Kepala Subbid Pengendalian dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah
 4. Yunita Wulan Apriyanti, S.Tr.IP (Analisis Data dan Informasi)
 5. Ujeddin (Pengadministrasi Umum)
 6. Ida Mega Rachmawaty (Pengadministrasi Umum)
- C. Tujuan dan Sasaran
1. Kepala Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah
 2. Kepala Subbid Perhitungan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah
 3. Kepala Subbid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah
 4. Andi Abdul Hakim, se (Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah)
 5. Andi Yunitasari, S.STP (Analisis Pajak dan Retribusi Daerah)
 6. Alimbachri, S.Sos (Pengelola Data dan Informasi Perpajakan)
- D. Rencana Kerja
1. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah
 2. Kepala Subbagian Umum dan SDM Badan Pendapatan Daerah
 3. Rahmat (Bendahara Pengeluaran)
 4. Adam Malik Karim, SE (Bendahara Gaji)
 5. Hasma Usman (Bendahara Penerima)

VIII. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ketua Tim : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sekretaris Tim : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Rijaluddin, ST (Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda).

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. M.Nachrun, ST (Analisis Bencana Ahli Muda)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kepala Subbagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

D. Rencana Kerja

1. Kepala Subbagian Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Rosma Heryani, S.Si, M.Si (Analisis Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan)
3. Rahma, SKM (Analisis Bencana Ahli Muda)

IX. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Ketua Tim : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sekretaris Tim : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Asniwali Syam, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Dahlan A, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
3. Hj. Nurdiah (Pengelola Gaji)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Hj. Mardawati, S.Sos, M.A.P (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
3. Amir (Bendahara Pengeluaran)

D. Rencana Kerja

1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Kasubag Program, Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Hadijah, S.Sos (Pengelola BMD)

X. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Ketua Tim : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Pembinaan SD dan SMP
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Arifai, S.Pd (Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter)
4. Kurnia Yuliani Nur, S.Sos (Pengelola Gaji)
5. Nursanti, S.Sos (Analisis Kinerja)
6. Andi Hasmiati, S.Kom (Analisis data informasi pendidik dan Tenaga Kependidikan)
7. Rinawati (Pengelola Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan GTK)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kasi GTK Dikdas Bidang Pembinaan SD dan SMP
2. Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SD dan SMP
3. Nasdir Rafli, S.Pd., M.Pd (JF Pamong Budaya)
4. Ibrahim, S.Sos (JF Pengembangan Teknologi Pembelajaran)
5. Suheda, S.Pd (Analisis Pengembangan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal)
6. Puspita Ratnaningsih, S.E (Analisis Keuangan)
7. Hj. Ernawati Mariala, S.Pd. M.Pd (Pengelola Sarpras PAUD dan PNF)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2. Baso Mustakim, S.Sos (Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
3. Hj. Surawaliah, S.Ag. M.M (Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter)
4. Darmiati, SH, M.Si (Kasi GTK PAUD dan PNF Bidang GTK)
5. Akhyar, S.Pd (Pengadministrasi Kurikulum pada bidang Pembinaan Pendidikan Dasar)
6. Iqbal Darmasena (Pranata Barang dan Jasa)
7. Andi Tutwuri Handayani, S.Sos (Pengelola Beasiswa)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Kebudayaan
2. Wahida, S.Pd. M.M (Kasubag Program)
3. Andi Srinono, ST., M.A.P (JF Pamong Budaya)
4. Munasiah Salam, S.Pd (Perencana Ahli Pertama)
5. Muhtar, S.Sos (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan)
6. Muhlis, A. Md (Pengadministrasian Umum)
7. Andi Makkulau, A. Ma (Pengadministrasian Kesenian dan Budaya Daerah)

XI. Dinas Kesehatan

Ketua Tim : Kepala Dinas Kesehatan

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Kesehatan

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM Dinas Kesehatan
3. Agus Pammu, SKM (Fungsional Epidemiologi)
4. Ervina Septiami AR, SKM, M.KM (Fungsional Sanitarian)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
2. Nurul Fajeriah, SKM, M.Tr.Adm.Kes (Fungsional Administrator Kesehatan)
3. Nuramalyah, SKM, M.Kes (Fungsional Tenaga PKIP)
4. Astuti Amirullah, SKM (Fungsional Epidemiologi)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK Dinas Kesehatan

2. Emmy Mustafa, SKM, M.Adm.Kes (Fungsional Administrator Kesehatan)
3. Hajerah, SKM (Fungsional Tenaga PKIP)
4. Nurlina, SKM (Fungsional Epidemiologi)

D. Rencana Kerja

1. Kasubag Program dan Keuangan Dinas Kesehatan
2. Adiatman, S.Kep (Pengelola Penyakit Tidak Menular)
3. Sukmawati, SKM (Fungsional Administrator Kesehatan)
4. Sukmawaty, S.Si, Apt, M.Tr.Adm.Kes (Fungsional Apoteker)

XII. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Ketua Tim : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang , Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang , Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Sumber Daya Air
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Suhaerul, ST, MT (JF Penata Ruang Ahli Muda)
4. Jafar, ST (JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda)
5. Safirah Syihab, ST, MM (JF Penata Ruang Ahli Muda)
6. Sahrir, ST (Pemeriksa Irigasi)
7. Sudirman Usman, S.Sos (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Cipta Karya, Penataan Ruang dan Pertanahan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan SDM
3. Hasriah Halide, ST, MT (JF Teknik Pengairan Ahli Muda)
4. Andi Tenriuleng, ST, MM (JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda)
5. Masudi, ST (JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda)
6. Dewi Sartika, ST, M.A.P(JF Penata Ruang Ahli Muda)
7. Syamsidar, S.T(Pengelola Jasa Konstruksi)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Bina Marga
2. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

3. Maslinah, ST, MT (JF Teknik Pengairan Ahli Muda)
4. Amsar HS, S.Sos (Analisis Reklamasi)
5. Rangga Birawa Jayasakti, SP.W.K (Analisis Tata Ruang)
6. Imam Firmansyah, ST (Analisis Perumahan)
7. Fhellindha Agusthiany Frans, S.T (Analisis Bangunan Gedung dan Pemukiman)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
2. Kepala Sub Bagian Program
3. Faisal, ST, MT (JF Teknik Pengairan Ahli Muda)
4. Suparman, ST (Pengawas Bangunan dan Gedung)
5. Roswita Dewi, ST (Analisis Jalan dan Jembatan)
6. Helnasiata, ST (Penata Kesehatan Lingkungan Permukiman)
7. Ahmad B. Jamaluddin, ST (Analisis Perumahan)

XIII. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Ketua Tim : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Sekretaris Tim : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Trantib
2. Kepala Bidang Penegakan Perda
3. Kepala Subbagian Umum dan SDM

B. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
2. Kepala Subbagian Program Dan Keuangan
3. Syamsurijal, S.Sos (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)

XIV. Dinas Sosial

Ketua Tim : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barru

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Barru

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Barru
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM Dinas Sosial Kabupaten Barru
3. Nahda S.Sos (Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda)
4. Mukarramah, S.IP (Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial
2. Tisa Ayuriana (Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda)
3. Wahida Mas,ud A.MD.HK (Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda)
4. Firmasyah (Pengelola Kesejahteraan Sosial)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Barru
2. Rysma Rahaju, SKM,M.Kes (Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda)
3. Annihaya Rauf, S.Sos (Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda)
4. Suyuti (Pengadministrasi Umum)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Sosial
2. Ilyas Ali, SE (Analisis Keuangan)
3. Andi Wetenri Esa Jalil, S.Sos (Fungsional Pekerja Sosial Pertama)
4. Syamsuriadi (Pengelola Data Bantuan Sosial)

XV. Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ketua Tim : Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM
3. Zaenaruddin, S.IP (Analisis Institusi Masyarakat Pedesaan pada Bidang Pemdес)
4. Ina Mualiah, SE (JF Penggerak Swadaya Masyarakat ahli Muda)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Ashbiyah, S.Sos (JF Penggerak Swadaya Masyarakat ahli Muda)
3. Hj. Adriana, SE. M. Pd (Fungsional Swadaya Masyarakat Ahli Muda)
4. Abdul Karim, S.Sos (JF Penggerak Swadaya Masyarakat ahli Muda)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Adriani Ramli, AMG (Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan KB)
3. Sitti Aisyah (Pengadministrasi Umum bidang PPKB)
4. Andi Nur Aminah, S.Sos (Pengelola Pemanfaatan BMD)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kepala Subbagian Program
3. Kamariah, S. Sos (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda)
4. Fatimah, S.Sos (Kepala UPTD PPA)

XVI. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Ketua Tim : Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Kepala Sub bagian Umum dan SDM
3. Suriani, S.Pt, M.Si (Fungsional Pengawas Bibit Ternak)
4. Nur Fatonny, SP (Analisis Pangan)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
3. Andi Sahriani, SP, M.Si (Fungsional Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian)
4. Ir. Andi Sukriah (Fungsional Analisis Ketahanan Pangan)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
2. Kepala Sub bagian Keuangan
3. Yoyok Bhakti Sugiyo, SP (Fungsional Penyuluh Pertanian Kabupaten)
4. Nur Rahmah, SP, MM (Fungsional Analisis Ketahanan Pangan)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2. Kepala Sub bagian Program
4. H. Hasyim Nur, S.Sos (Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian)
3. Kurniyati Lukman, S.P (Fungsional Perencana)

XVII. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Ketua Tim : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kolompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kasubag Penyusunan Program
2. Kasubag Keuangan
3. Kasubag Umum

B. Telaah Kebijakan

1. Haris Amrullah, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
2. Irpan, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
3. Hj. Nur Alam (Adyatama Ahli Muda)
4. Andi Rospayani Paweloi, S.Pi. (Adyatama Ahli Muda)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Vandy Eka Atmaja, S.E. (Perencana Ahli Pertama)
2. Nurhidayat, S.S. (Pengelola Informasi Kepariwisata)
3. Ashar Ashari Azis, S.Pd (Analisis Keolahragaan)
4. Muh. Sabir, S.E. (Analisis Keuangan)
5. Umi Kalsum, S.Par. (Adyatama Ahli Pertama)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Kepemudaan
2. Kepala Bidang Olahraga
3. Kepala Bidang Pariwisata
4. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif

XVIII. Dinas Lingkungan Hidup

Ketua Tim : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM Dinas Lingkungan Hidup
3. Nurhayati, ST.,M.Si (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Pengendali Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
2. Pratiwi Puji Lestari, ST (Analisis Lingkungan Hidup)

3. Kartini S (Pengelola Gaji)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas LH Dinas Lingkungan Hidup.
2. Marwah, S.SP (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda)
3. Samsumardin (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup
2. Artina Nur (Analisis Keuangan)
3. Fahmi T (Pengelola Barang dan Aset Daerah)

XIX. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ketua Tim : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM
3. Andi Nursyamsu, S.Kom (Administrator Database Ahli Muda)
4. Nurul Hilal Bahnar, S.IP (Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Hj. Murniati, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
3. Hj. Jumiati, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
4. Nur Fadillah Kaharuddin. S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Santy Alimuddin, S.Kom.MM (Pranata Komputer Ahli Muda)
3. Sri Sastrawati, S.Pd (Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
4. Haidir, Amd.Kom (Operator SIAK Terampil)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Subbagian Program dan Keuangan
2. Nasma, S.Sos (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)
3. Nur Alam Marwah Rasyid (Analisis Keuangan)
4. Titin Sumarni, S.Sos (Bendahara)

XX. Dinas Perikanan

Ketua Tim : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barru

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Barru

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayaan Kecil, Usaha Kecil dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan SDM
3. Hendra, S.Pi (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)
4. Herianty, S.Pi (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)
5. Arifuddin, S.Pi (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda)
6. Supratman, S.Pi (Analisis Pengelolaan Sumber Daya)
7. Rahmawati, A.Md.Pi (Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap)
8. Awaluddin Darwis, S.Kel (Analisis Kenelayanan)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
2. Al'Amin, S.Pi, M.Si (Analisis Akuakultur Ahli Muda)
3. Marwan Edy, S.Pi (Pengawas Perikanan Ahli Muda)
4. Awaluddin Darwis, S.Kel (Analisis Standarisasi Budidaya)
5. Asriani (Analisis Budidaya Perikanan)
6. Sitti Rukiah, S.Pi (Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
2. A.Pusva Yulyana, S.Pi (Pengawas Perikanan Ahli Muda)
3. Dahrifuddin, S.Pi (Analisis Pasar hasil Perikanan Ahli Muda)
4. Arniati, S.Pi (Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda)
5. Rahmawati Idrus, A.Md.Pi (Pengawas Perikanan terampil)
6. Muhdar, S.Pi (Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
2. Supratman, S.Pi (Analisis Pengelolaan Sumber Daya)
3. Miftah Sudirman, S.Pi (Bendahara Pengeluaran)
4. Wahyudi, S.Pi (Analisis Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan)
5. Jaini, S.Pi (Analisis Kinerja)

XXI. Dinas Perhubungan

Ketua Tim : Kepala Dinas Perhubungan

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Perhubungan

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Angkutan dan Sarana
2. Kasubag Umum dan SDM
3. Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek
4. Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Annisa Putri Nur, ST
7. Musliha
8. Rahman Bin Tamrin
9. Samsul Bahri, A.Md
10. Nurlaela, A.Md
11. Muhammad Idris
12. Syainal Syahdan

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Lalu Lintas
2. Kepala Seksi Manajemen Lalulintas Jalan
3. Kepala Seksi Rekayasa Lalulintas dan Penerangan Jalan Umum
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Saharuddin, S.Sos
6. Jamaluddin
7. Asdar, SM
8. Zainal Arifin

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Prasarana, Pengembangan dan Keselamatan
2. Kepala Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan
3. Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Dharma Agus
6. Muhammad Amin
7. Imran Sutar
8. Irwan Anas

D. Rencana Kerja

1. Kepala Subbagian Program dan Keuangan

2. Kasubag TU UPTD Pelabuhan Penyeberangan Ferry Garongkong
3. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Ferry Garongkong
4. Kepala UPTD Terminal dan Perparkiran
5. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Ahmad Adil Jaya
7. Jumadil
8. Fahyuddin, A.Md
9. Sarkiah
10. Ma'ruf, A.Ma. PKB
11. Kartini
12. Ashar

XXII. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ketua Tim : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kasubag Program dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Halisa Ya'kub, SE (Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan)
4. Muhammad Ahmad Aminuddin, A.Md (Bedahara Pengeluaran)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Hj. Faisah, SE (Analisis Kebijakan)
3. Andi Badarauddin, S.Sos (Analisis Kebijakan)
4. Zilkifli, S.Kom (Pranata Komputer)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Abdi Setiawan, SE (Analisis Kebijakan)
3. Sitti Wahidah Musir, S.Sos (Analisis Dokumen Perizinan)
4. Amrullah Hasan, S.Kom (Ahli Pertama – Pranata Komputer)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Indra, SE.,M.Si (Analisis Kebijakan)
3. Gusti Ayu Anugrah, S.AP (Analisis Kebijakan)
4. Ade Vitrayanti B, S.M (Pengawas Penanaman Modal)

XXIII. Dinas Tenaga Kerja

Ketua Tim : Kepala Dinas Tenaga Kerja

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Iskandar, ST., M.Si (Fungsional Pengantar Kerja)
3. Syafruddin, SE (Fungsional Pengantar Kerja)
4. Diah Rizky Pardani, S.Sos (Analisis Tenaga Kerja)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang HI, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Amirullah, SH (Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial)
3. Arfiah, SH (Fungsional Mediator Hubungan Industrial)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Subbagian Umum dan SDM Dinas Tenaga Kerja
2. Asri Rahayu Anas, A.Md (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah)
3. Masykur (Pengadministrasian Umum)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja
2. Ruslinawati, A.Md (Pengelola Gaji Pada Sub Bagian Program dan Keuangan)
3. Rismayanti (Pengadministrasian Keuangan)

XXIV. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Ketua Tim : Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, Distribusi Bahan Pokok, Penting Dan Perindustrian Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3. Herawati, S.E. (Penyuluh Perindustrian Dan Pedagangan Ahli Muda)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2. Muhayyar Sabir, S.E.,M.M (Fungsional Pengawas Koperasi)
3. Yusuf Albahtimi, S.E. (Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Sarana Distribusi Dan Pelaku Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2. Andi Wikra Sanjaya Djamruk, S.H. (Analisis Perdagangan Ahli Muda)
3. Akisman, S.E. . (Analisis Perdagangan Ahli Muda)

D. Rencana Kerja

1. Kepala UPTD Metrologi Legal
2. Kepala Subbagian Program Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3. Hasni Sofian, S.Sos (Fungsional Analisis Perdagangan)
4. Fachrul Zulfikar Dahri, S.T. (Analisis Koperasi)

XXV. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Ketua Tim : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3. Jemma, S.Kom (Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda)
4. Asri Asik, ST,M.I.Kom (Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Marjani Zainal Abidin, SH (Fungsional Pranata Humas Ahli Muda)
3. Syamsuriati, S. Sos (Fungsional Pranata Humas Ahli Muda)
4. Aswar (Pengelola Gaji)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Kepala Subbagian Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3. Syaribulan, S.Pi, M,Si (Analisis Data Statistik)
4. Harniati, S.Si (Statistisi Ahli Pertama)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Kepala Subbagian Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3. Akbar Arafah, ST (Fungsional Sandiman Ahli Muda)
4. Hasmiah, S. Kom (Pranata Barang dan Jasa)

XXVI. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Ketua Tim : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Halwiana Laewa, S. Sos (Fungsional Pustakawan Ahli Muda)
3. Rosdiana Ismail, S. Sos (Fungsional Pustakawan Ahli Muda)
4. Suskati, S. Sos (Fungsional Arsiparis Ahli Muda)
5. Asriani, S. Sos (Fungsional Pustakawan Ahli Muda)
6. Suharpan. K (Pengadministrasi Umum Bidang Perpustakaan)

B. Telaahan Kebijakan

1. Marawiah, S. Sos (Fungsional Pustakawan Ahli Muda)
2. Samsinar, S. Sos (Fungsional Arsiparis Ahli Muda)
3. Hj. Khaeriah, SE, M.M (Fungsional Pustakawan Ahli Muda)
4. Pertiwi Hardiknas Putri, SE, M. A.P (Fungsional Pustakawan Ahli Muda)

5. Fitrayana Taufik, A. Md (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Subbagian Umum dan SDM)
6. Carles (Pengadministrasi Umum Subbagian Umum dan SDM)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Subbagian Umum dan SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Hj. Sitti Hamrina, S. Sos (Fungsional Arsiparis Ahli Muda)
3. Dra. Hj. Nurbaya (Fungsional Arsiparis Ahli Muda)
4. Adnawiah, S.I.Pust (Fungsional Pustakawan Ahli Muda)
5. Syahriah, S. Sos (Pengawas Perpustakaan)
6. Yuliastri, A. Ma. Pust (Pengelola Bahan Pustaka Bidang Perpustakaan)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3. H. Wirawan Jaya, SE, M.I.Kom (Fungsional Pustakawan Ahli Muda)
4. Darhan, S. Sos (Fungsional Arsiparis Ahli Muda)
5. Yammarnas, S.I.Pust (Fungsional Pustakawan Ahli Pertama)
6. Nurhaedah Nar, S. Sos (Fungsional Arsiparis Ahli Pertama)
7. Roslina (Pengadministrasi Keuangan Subbagian Program dan Keuangan)

XXVII. Kantor Kecamatan Barru

Ketua Tim : Camat Barru

Sekretaris Tim : Sekretaris Camat Barru

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kantor Kecamatan Barru
2. Kepala Sub Bagian Umum Kantor Kecamatan Barru

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kantor Kecamatan Barru
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kantor Kecamatan Barru

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Barru

2. Kepala Sub Bagian Keuangan Kantor Kecamatan Barru

D. Rencana Kerja

1. Kepala Sub Bagian Program Kantor Kecamatan Barru
2. Mahrung (Pengadmisntrasi Keuangan)

XXVIII. Kantor Kecamatan Tanete Rilau

Ketua Tim : Camat Tanete Rilau

Sekretaris Tim : Sekretaris Camat Tanete Rilau

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
2. Kepala Subbagian Keuangan

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
2. Kepala Subbagian Umum

D. Rencana Kerja

1. Kepala Subbagian Program
2. Bendahara Pengeluaran

XXIX. Kantor Kecamatan Tanete Riaja

Ketua Tim : Camat Tanete Riaja

Sekretaris Tim : Sekretaris Camat Tanete Riaja

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kantor Kecamatan Tanete Riaja
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM Kantor Kecamatan Tanete Riaja

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kantor Kecamatan Tanete Riaja
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kantor Kecamatan Tanete Riaja

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Tanete Riaja
2. Kepala Subbagian Keuangan Kantor Kecamatan Tanete Riaja

D. Rencana Kerja

1. Kepala Subbagian Program Kantor Kecamatan Tanete Riaja
2. Halikman, S.Sos. (Pengadministrasi Keuangan)

XXX. Kantor Kecamatan Pujananting

Ketua Tim : Camat Pujananting

Sekretaris Tim : Sekretaris Camat Pujananting

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kantor Kecamatan Pujananting
2. Kepala Subbagian Umum Kantor Kecamatan Pujananting

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kantor Kecamatan Pujananting
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kantor Kecamatan Pujananting

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Pujananting
2. Kepala Subbagian Keuangan Kantor Kecamatan Pujananting

D. Rencana Kerja

1. Kepala Subbagian Program Kantor Kecamatan Pujananting

XXXI. Kantor Kecamatan Balusu

Ketua Tim : Camat Balusu

Sekretaris Tim : Sekretaris

Kelompok Kerja :

E. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
2. Kepala Sub Bagian Keuangan

F. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

G. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
2. Kepala Sub Bagian Umum

H. Rencana Kerja

1. Kepala Sub Bagian Program
2. Bendahara Keuangan

XXXII. Kantor Kecamatan Soppeng Riaja

Ketua Tim : Camat Soppeng Riaja

Sekretaris Tim : Sekretaris Camat Soppeng Riaja

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Soppeng Riaja
2. Kepala Sub bagian Umum Kecamatan Soppeng Riaja

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Soppeng Riaja
2. Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum Kecamatan Soppeng Riaja

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Soppeng Riaja
2. Kepala Sub bagian Keuangan Kecamatan Soppeng Riaja

D. Rencana Kerja

1. Kepala Sub bagian Program Kecamatan Soppeng Riaja
2. Hamzah,S.A.P (Pengadministrasian Keuangan)

XXXIII. Kantor Kecamatan Mallusetasi

Ketua Tim : Camat Mallusetasi

Sekretaris Tim : Sekretaris Camat Mallusetasi

Kelompok Kerja :

A. Evaluasi Kinerja

1. Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Mallusetasi
2. Kepala Subbagian Umum dan SDM Kantor Kecamatan Mallusetasi
3. Sulfan,S.Hut (Analisis Pemerintah Daerah)

B. Telaahan Kebijakan

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Kecamatan Mallusetasi
2. Mustang (Pengadministrasi Perekonomian dan Pembangunan)
3. Andi Alamsyah (Pengelola Gaji)

C. Tujuan dan Sasaran

1. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Kecamatan Mallusetasi
2. Kepala Subbagian Keuangan Kantor Kecamatan Mallusetasi
3. Suparman (Pengadministrasi Perencanaan dan Program)

D. Rencana Kerja

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kantor Kecamatan Mallusetasi
2. Kepala Subbagian Program Kantor Kecamatan Mallusetasi
3. Andi Amiruddin (Pengadministrasi PMD)





BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD Tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;

- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - f. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Perikanan;
 - l. Dinas Kesehatan;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - n. Dinas Perhubungan;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Dinas Tenaga Kerja;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
 - r. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - t. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - u. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - v. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - w. Badan Pendapatan Daerah;
 - x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - z. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - aa. Kecamatan Barru;
 - bb. Kecamatan Tanete Rilau;
 - cc. Kecamatan Tanete Riaja;
 - dd. Kecamatan Pujananting;
 - ee. Kecamatan Balusu;
 - ff. Kecamatan Soppeng Riaja;
 - gg. Kecamatan Mallusetasi.
- (3) Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun 2024;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 5 Juli 2024
BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- f. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
- g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Perikanan;
- l. Dinas Kesehatan;
- m. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Tenaga Kerja;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
- r. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- t. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- v. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- w. Badan Pendapatan Daerah;
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- z. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- aa. Kecamatan Barru;
- bb. Kecamatan Tanete Rilau;
- cc. Kecamatan Tanete Riaja;
- dd. Kecamatan Pujananting;
- ee. Kecamatan Balusu;
- ff. Kecamatan Soppeng Riaja;
- gg. Kecamatan Mallusetasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan	I-9
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-26
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-33
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-45
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-57
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-1
3.3. Program dan Kegiatan	III-7
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Bappelitbangda Kabupaten Barru	II-2
II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru	II-27
II.3	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Barru	II-33
II.4	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-34
II.5	Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru	II-36
II.6	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru Berdasarkan Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	II-39
II.7	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru Berdasarkan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	II-40
II.8	Tabel Indikator TPB Bappelitbangda	II-41
II.9	Faktor Penghambat dan Pendorong Terkait Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru Ditinjau dari Keterlibatan RTRW dan KLHS	II-42
II.10	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Bappelitbangda Kabupaten Barru	II-46
II.11	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Bappelitbangda Kabupaten Barru	II-57
III.1	Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Barru .	III-3
III.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025	III-5
III.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Bappelitbangda Kabupaten Barru	III-8
III.4	Rumusan Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Bappelitbangda Kabupaten Barru	III-16
IV.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 Bappelitbangda Kabupaten Barru	IV-2

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
I-1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru	I-3
I-2	Alur Perencanaan dan Penganggaran Nasional dan Daerah (Kedudukan Renja Perangkat Daerah dalam SPPN)	I-4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan kinerja merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini perencanaan kinerja menjadi suatu hal yang cukup kritical yang harus dijadikan focus perhatian oleh manajemen. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja sungguh merupakan issu yang stratejik yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian misi organisasi.

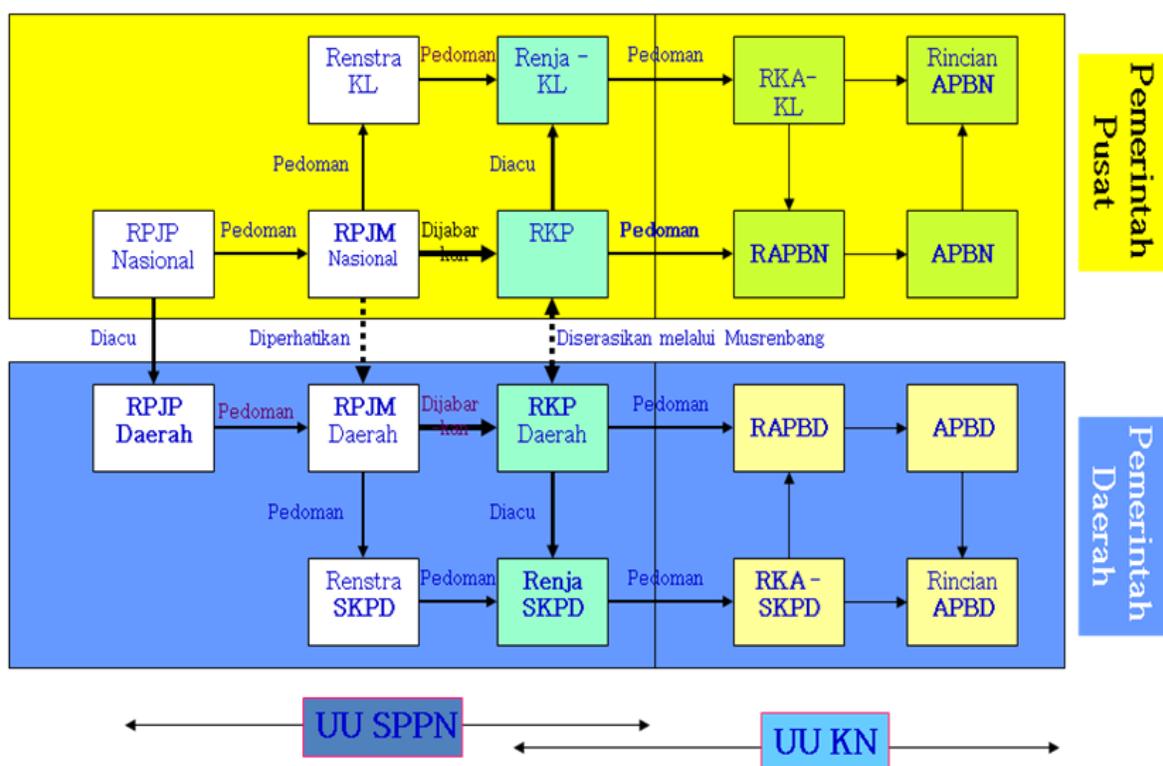
Perencanaan kinerja menghasilkan dokumen perencanaan yang disebut sebagai Rencana Kerja (Renja). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Barru Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kinerja pada Lingkup Bappelitbangda Kabupaten Barru untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025 melalui 6 (enam) tahapan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan pertama adalah persiapan penyusunan Renja yang terdiri dari penyusunan rancangan keputusan bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja, orientasi mengenai Renja kepada seluruh anggota tim, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. **Tahapan kedua** adalah penyusunan Rancangan Awal Renja yang mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. **Tahapan ketiga** yaitu penyusunan rancangan Renja yang merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja dan selanjutnya dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. **Tahapan keempat** adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. **Tahapan kelima** adalah perumusan Rancangan Akhir Renja yang merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja menjadi rancangan akhir Renja berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD. **Tahapan keenam** adalah penetapan Renja melalui Keputusan Bupati Barru paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati Barru tentang RKPD Tahun 2025 ditetapkan. Tahapan penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Renja Bappelitbangda Tahun 2025 berpedoman kepada Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Sementara itu, RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN Tahun 2005-2025. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Barru yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya. Renja Bappelitbangda Tahun 2025 menjadi pedoman Bappelitbangda dalam menyusun RKA Bappelitbangda Tahun 2025. Keterkaitan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar I.2
Alur Perencanaan dan Penganggaran Nasional dan Daerah
(Kedudukan Renja Perangkat Daerah dalam SPPN)



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2000-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1247);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
23. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);
 28. Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 33);
 29. Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 23);
 30. Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 4);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025 adalah untuk memberi gambaran akan bentuk kerja Bappelitbangda Kabupaten Barru dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. Tujuannya adalah:

1. Menghubungkan perencanaan strategis dengan perencanaan operasional yang lebih rinci.
2. Menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai penganggaran.
3. Memudahkan melakukan pengukuran dan penilaian kinerja.
4. memudahkan manajemen dalam menetapkan target pada unit kerja.
5. Memudahkan dalam membuat spesifikasi kontrak untuk pembayaran kepada pihak yang diberi pekerjaan berdasarkan capaian kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru serta susunan garis besar isi dokumen, adalah:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, terdiri dari:

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, terdiri dari:

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah (kalau sudah tersedia), dan perkiraan pelaksanaan DPA-Perangkat Daerah (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra Perangkat Daerah, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Mengingat laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Bappelitbangda belum disusun pada Tahun 2024, maka dibuat rekapitulasi hanya berdasarkan perkiraan pelaksanaan DPA-Perangkat Daerah tahun berjalan yang baru disahkan dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Bappelitbangda. Rekapitulasi realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Bappelitbangda Kabupaten Barru

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5										
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	01									
	PERENCANAAN									
5	01	01								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Level 3	Level 2	Level 3	Level 1	33,33%	Level 3	Level 2	66,67%
		Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	20 JPL	20 JPL	100,00%	20 JPL	20 JPL	100,00%
5	01	01	2.02							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/bulan	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	100,00%	27 Orang/bulan	81 Orang/bulan	57,86%
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan kepegawaian perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	100%	0	0	0,00%	0	6,06%	6,06%
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	132 Orang	8 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00%	0 Orang	8 Orang	6,06%
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	0	0	0,00%	1 Paket	2 Paket	40,00%
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	3 Paket	60,00%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		dan Perlengkapan Kantor												
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	3 Paket	60,00%
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	10,00%	4 Paket	12 Paket	60,00%
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	3 Paket	60,00%
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630 Laporan	84 Laporan	108 Laporan	101 Laporan	93,52%	74 Laporan	259 Laporan	41,11%
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	10,53%	10,53%	10,53%	100,00%	0,00%	21,05%	21,05%
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan	Jumlah Unit Peralatan	19 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00%	0 Unit	4 Unit	21,05%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	dan Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Disediakan												
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	37,21%	24 Laporan	72 Laporan	60,00%
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	40,00%	12 Laporan	36 Laporan	60,00%
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	24 Unit	0 Unit	6 Unit	7 Unit	100,00%	7 Unit	14 Unit	58,33%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	7 Berita Acara	1 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100,00%	1 Berita Acara	4 Berita Acara	57,14%
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	6 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100,00%	1 Berita Acara	3 Berita Acara	50,00%
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	7 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100,00%	2 Berita Acara	4 Berita Acara	57,14%
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	44 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	11 Dokumen	26 Dokumen	59,09%
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan	Jumlah Orang yang Dibina dalam	176 Orang	0 Orang	44 Orang	44 Orang	100,00%	44 Orang	88 Orang	50,00%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah												
5	01	02	2.03											
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	33 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100,00%	8 Laporan	18 Laporan	54,55%
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	80 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100,00%	16 Laporan	48 Laporan	60,00%
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan												
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahandan Pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	256 Rekomendasi / Kajian / Laporan	48 Rekomendasi / Kajian / Laporan	48 Rekomendasi / Kajian / Laporan	48 Rekomendasi / Kajian / Laporan	100,00%	48 Rekomendasi / Kajian / Laporan	144 Rekomendasi / Kajian / Laporan	56,25%
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	132 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00%	24 Dokumen	72 Dokumen	54,55%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 01 03 2.01 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	60,00%
5 01 03 2.01 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	8 Dokumen	24 Dokumen	54,55%
5 01 03 2.01 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	4 Laporan	12 Laporan	60,00%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	96 Rekomendasi / Kajian / Laporan	18 Rekomendasi / Kajian / Laporan	18 Rekomendasi / Kajian / Laporan	18 Rekomendasi / Kajian / Laporan	100,00%	18 Rekomendasi / Kajian / Laporan	54 Rekomendasi / Kajian / Laporan	56,25%
5 01 03 2.02 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	8 Dokumen	24 Dokumen	54,55%
5 01 03 2.02 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	4 Laporan	12 Laporan	60,00%
5 01 03 2.02 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	22 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	12 Dokumen	54,55%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)												
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	2 Laporan	6 Laporan	60,00%
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	176 Rekomendasi / Kajian / Laporan	33 Rekomendasi / Kajian / Laporan	33 Rekomendasi / Kajian / Laporan	33 Rekomendasi / Kajian / Laporan	100,00%	33 Rekomendasi / Kajian / Laporan	99 Rekomendasi / Kajian / Laporan	56,25%
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	44 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	8 Dokumen	24 Dokumen	54,55%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)												
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	4 Laporan	12 Laporan	60,00%
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	77 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100,00%	14 Dokumen	42 Dokumen	54,55%
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	35 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100,00%	7 Laporan	21 Laporan	60,00%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
5 05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5 05 02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nilai Indeks Inovasi Daerah	60,01 Poin	46,13 Poin	60,01 Poin	48,50 Poin	80,82%	60,01 Poin	48,50 Poin	80,82%
5 05 02 2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5 05 02 2.01 0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Laporan	60,00%	

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Laporan	60,00%
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Laporan	60,00%

Adapun pencapaian kinerja pada tahun lalu yaitu tahun 2022 secara umum dapat disajikan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

1.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.1.1.1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Output sub kegiatan adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 108 Laporan. Adapun realisasinya adalah 101 laporan dengan capaian sebesar 93,52%.

1.1.2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1.2.1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Output sub

kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 24 Unit. Adapun realisasinya adalah 15 Unit dengan capaian sebesar 62,50%.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2.1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Output sub kegiatan

adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 27 Orang/bulan. Adapun realisasinya adalah 27 Orang/bulan dengan capaian sebesar 100%.

2.1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

2.1.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor. Output sub kegiatan adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 Paket. Adapun realisasinya adalah 1 Paket dengan capaian sebesar 100%.

- 2.1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.1.3.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 24 laporan. Adapun realisasinya adalah 24 laporan dengan capaian sebesar 100%.
 - 2.1.3.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan. Adapun realisasinya adalah 12 laporan dengan capaian sebesar 100%.
- 2.2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 - 2.2.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 2.2.1.1. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan adalah Jumlah Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota sebanyak 1 Berita Acara. Adapun realisasinya adalah 1 Berita Acara dengan capaian sebesar 100%.
 - 2.2.1.2. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sebanyak 8 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 8 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.
 - 2.2.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.2.2.1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah. Output sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi sebanyak 44 Orang. Adapun realisasinya adalah 44 Orang masukan dengan capaian sebesar 100%.

2.2.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.2.3.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sebanyak 5 Laporan. Adapun realisasinya adalah 5 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.2.3.2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah sebanyak 16 Laporan. Adapun realisasinya adalah 16 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia

2.3.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 24 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 24 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

2.3.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan sebanyak 12 Laporan. Adapun realisasinya adalah 12 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.3.1.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

(RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 8 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 8 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

2.3.1.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia sebanyak 4 Laporan. Adapun realisasinya adalah 4 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.3.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

2.3.2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 8 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 8 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

2.3.2.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian sebanyak 4 Laporan. Adapun realisasinya adalah 4 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.3.2.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

sebanyak 4 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 4 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

2.3.2.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA sebanyak 2 Laporan. Adapun realisasinya adalah 2 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.3.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

2.3.3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 8 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 8 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

2.3.3.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur sebanyak 4 Laporan. Adapun realisasinya adalah 4 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.3.3.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 14 Dokumen. Adapun realisasinya adalah 14 Dokumen dengan capaian sebesar 100%.

2.3.3.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada

Bidang Kewilayahan sebanyak 7 Laporan. Adapun realisasinya adalah 7 Laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2.4.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

2.4.1.1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebanyak 1 laporan. Adapun realisasinya adalah 1 laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.4.1.2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi sebanyak 1 laporan. Adapun realisasinya adalah 1 laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.4.1.3. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan. Output sub kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan sebanyak 1 rekomendasi. Adapun realisasinya adalah 1 rekomendasi dengan capaian sebesar 100%.

2.4.1.4. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan sebanyak 1 laporan. Adapun realisasinya adalah 1 laporan dengan capaian sebesar 100%.

2.4.2. **Pengembangan Inovasi dan Teknologi**

2.4.2.1. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif. Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif sebanyak 1 laporan. Adapun realisasinya adalah 1 laporan dengan capaian sebesar 100%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

4.1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah:

1. Rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah dalam bentuk perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang dipengaruhi oleh undangan pihak terkait yang berasal dari kementerian, pemerintah provinsi atau daerah lainnya.
2. Kegiatan Pemeliharaan merupakan kegiatan yang hanya digunakan apabila terdapat barang milik daerah yang memerlukan tindakan untuk menjaga atau memperbaiki kendaraan operasional, mebel, gedung, peralatan dan mesin kantor lainnya sehingga kondisinya tetap layak dipakai.

4.2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

Beberapa faktor penyebab terpenuhinya pemenuhan target kinerja adalah:

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan berbasis pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
3. Komitmen pengguna anggaran dalam menjaga konsistensi program yang ada pada RKPD sepenuhnya berpedoman kepada RPJMD, dan program yang ada pada APBD sepenuhnya berpedoman kepada RKPD
4. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengawal kegiatan agar tetap on the track dan dapat dijadikan langkah deteksi dini apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan
5. Optimalnya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan
6. Optimalnya peran APIP dalam melakukan pengawasan penyusunan perencanaan dan penganggaran melalui reviu dokumen perencanaan dan penganggaran

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

- a) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan indikator Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2023 realisasi adalah LEVEL 1 tidak sesuai dengan target Renstra tahun berjalan yaitu LEVEL 3. Meskipun berdasarkan perbandingan ini realisasi tidak sesuai dengan target, proyeksi target yang akan digunakan pada tahun pelaksanaan dan

tahun rencana serta tahun selanjutnya tetap menggunakan proyeksi sesuai arah Renstra untuk mencapai target Renstra sampai dengan tahun 2026 sebagai periode akhir perencanaan jangka menengah yaitu LEVEL 3.

- b) PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH dengan indikator Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu pada tahun 2023 realisasi sebesar 100% telah sesuai dengan target Renstra tahun berjalan. Berdasarkan perbandingan ini maka untuk mencapai target Renstra sampai dengan tahun 2026 sebagai periode akhir perencanaan jangka menengah sebesar 100% berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun sebelumnya sehingga proyeksi target pada tahun pelaksanaan dan tahun rencana serta tahun selanjutnya digunakan proyeksi sesuai arah Renstra.
- c) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH dengan indikator Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan pada tahun 2023 realisasi sebesar 100% telah sesuai dengan target Renstra tahun berjalan. Berdasarkan perbandingan ini maka untuk mencapai target Renstra sampai dengan tahun 2026 sebagai periode akhir perencanaan jangka menengah sebesar 100% berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun sebelumnya sehingga proyeksi target pada tahun pelaksanaan dan tahun rencana serta tahun selanjutnya digunakan proyeksi sesuai arah Renstra.
- d) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH dengan indikator Nilai Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2023 realisasi sebesar 48,50 Poin tidak sesuai dengan target Renstra tahun berjalan yaitu 60,01 Poin. Meskipun berdasarkan perbandingan ini realisasi tidak sesuai dengan target, proyeksi target yang akan

digunakan pada tahun pelaksanaan dan tahun rencana serta tahun selanjutnya tetap menggunakan proyeksi sesuai arah Renstra untuk mencapai target Renstra sampai dengan tahun 2026.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a) Membuat rencana operasional tahunan meliputi perumusan: (1) input atau sumberdaya yang akan dibutuhkan; (2) aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan; (3) volume output yang akan dihasilkan, serta (4) hasil (outcomes) sebagai indikator keberhasilan program/kegiatan. Akurasi perencanaan kinerja sangat menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran karena perencanaan yang baik kemungkinan besar akan menghasilkan kinerja yang sesuai dengan harapan.
- b) Melakukan administrasi kinerja dengan baik yang akan diperlukan dalam pelaporan kinerja. Selain itu, setiap tantangan dan hambatan perlu didokumentasikan dengan tertib guna pembelajaran organisasi ke depan. Disamping itu, dokumen-dokumen kinerja dimaksud juga merupakan informasi yang penting dalam pengukuran kinerja organisasi.
- c) Melakukan pengukuran kinerja. untuk menilai apakah sumberdaya input yang disediakan telah terpakai secara efektif dan efisien dalam mencapai hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai apakah semua elemen organisasi (input, proses, output) telah berfungsi secara optimal untuk menghasilkan outcomes. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai apakah target kinerja indikator kinerja utama telah tercapai sesuai dengan rencana kerja tahunan.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Monitoring program/kegiatan dilakukan untuk memonitor perkembangan pelaksanaan anggaran sebagai upaya tindakan preventif dalam mencegah kegagalan dan menilai kesesuaian antara

perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Sedangkan evaluasi program/kegiatan dilakukan untuk menilai sejauh mana program/kegiatan pemerintah telah berhasil mencapai tujuannya dan apakah hasil dimaksud telah memberikan dampak yang signifikan dalam memenuhi tujuan organisasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Bappelitbangda berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappelitbangda dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Menganalisis kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru digunakan Indikator Kinerja berdasarkan target Renstra Bappelitbangda tahun 2021-2026. Penilaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Barru dilakukan terhadap indikator sasaran dengan mengukur target yang telah ditetapkan dan realisasi yang dicapai mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Selanjutnya berdasarkan kondisi target menurut Renstra Bappelitbangda dan perkiraan tahun berjalan, menghitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan Bappelitbangda.

Mengingat pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun-tahun lalu mempunyai kinerja baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun sebelumnya sehingga proyeksi target pada tahun pelaksanaan dan tahun rencana serta tahun selanjutnya digunakan proyeksi sesuai arah Renstra.

Rekapitulasi hasil pencapaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Barru dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023 (thn n-2)	2024 (thn n-1)	2025 (thn n)	2026 (thn n+1)	2023 (thn n-2)	2024 (thn n-1)	2025 (thn n)	2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Perencanaan Pembangunan											
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Proyeksi sesuai arah Renstra
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Proyeksi sesuai arah Renstra
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Proyeksi sesuai arah Renstra
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Proyeksi sesuai arah Renstra
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023 (thn n-2)	2024 (thn n-1)	2025 (thn n)	2026 (thn n+1)	2023 (thn n-2)	2024 (thn n-1)	2025 (thn n)	2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra
4	Penelitian dan Pengembangan											
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Proyeksi sesuai arah Renstra

Bappelitbangda merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dan kelitbang daerah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru.

Untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap bidang urusan perencanaan dan bidang urusan kelitbang, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKK). Kinerja Pelayanan Bappelitbangda terdiri dari 10 IKK yang terdiri dari enam indikator bidang urusan Perencanaan Pembangunan dan empat indikator bidang urusan Penelitian dan Pengembangan. Realisasi indikator sasaran yang telah dicapai sampai dengan tahun 2023 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra 2021-2026 telah memenuhi target. Rinciannya adalah pada IKK terdapat sembilan indikator yang melebihi atau diatas target kinerja yang direncanakan, satu indikator yang memenuhi atau sama dengan target kinerja yang direncanakan dan tidak terdapat indikator yang tidak memenuhi atau di bawah target kinerja yang direncanakan. Analisis kinerja keenam indikator diuraikan sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA. Target indikator kinerja pada tahun 2023 adalah 11 dokumen dan realisasi sebesar 11 dokumen dengan capaian sebesar 100%. Dokumen perencanaan yang disusun pada tahun 2023 adalah:
 - 1) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2024;
 - 2) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2024;
 - 3) Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2024;
 - 4) Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 10);

- 5) Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2023;
- 6) Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2023;
- 7) Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barru Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 11); dan
- 8) Rancangan Awal RPJP Kabupaten Barru Tahun 2025-2045.

Selain dokumen rencana pembangunan tahunan, Kabupaten Barru juga telah menetapkan dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah. Dokumen perencanaan dimaksud adalah:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4); dan
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 1).

Keberhasilan pencapaian angka 100% ditunjukkan dengan implementasi sistem perencanaan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD. Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 adalah 100% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD adalah perbandingan jumlah program RKPD tahun berkenaan terhadap jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD sebesar 100% dicapai secara berturut-turut selama lima tahun yaitu pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Angka 100% menunjukkan dokumen RKPD telah konsisten dengan RPJMD yaitu Program yang ada pada RPJMD telah dijabarkan sepenuhnya pada RKPD.

3. Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD. Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 adalah 100% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD adalah perbandingan jumlah program APBD tahun berkenaan terhadap jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan. Penjabaran program RKPD kedalam APBD sebesar 100% dicapai secara berturut-turut selama lima tahun yaitu pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Angka 100% menunjukkan dokumen APBD telah konsisten dengan RKPD yaitu program yang ada pada APBD sepenuhnya telah berpedoman kepada RKPD.

4. Persentase implementasi rencana kelitbang. Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 adalah 100% dan realisasi sebesar 100%.

Target Indikator Kinerja “Persentase implementasi rencana kelitbangan” terealisasi 100% dipengaruhi oleh terdapat tujuh jumlah kelitbangan dalam dokumen RKPD sesuai dengan perencanaan kelitbangan dalam dokumen RPJMD.

5. Target Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 adalah 100% dan realisasi sebesar 100%.

Indikator kinerja “Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan” memiliki realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh telah diintegrasikannya seluruh dokumen kelitbangan ke dalam perencanaan daerah

6. Target Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 adalah 100% dan realisasi sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja “Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah” sesuai dengan target dipengaruhi oleh telah dilakukannya kegiatan sosialisasi, diseminasi dan coaching clinic bagi pelaku inovasi di perangkat daerah. Hal ini meningkatkan pemahaman sumber daya manusia pada perangkat daerah terhadap inovasi daerah.

7. Target Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Target indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 adalah 100% dan realisasi sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja “Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah” sesuai dengan target disebabkan adanya kebijakan daerah bagi seluruh perangkat daerah untuk membuat inovasi yang dapat menunjang kinerja pegawai dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Kebijakan daerah dimaksud berupa percepatan pelaksanaan inovasi daerah yang merupakan salah satu program prioritas pembangunan daerah tahun 2023. Selain itu, Kabupaten Barru pada tahun 2023 mengikuti arahan pemerintah pusat pada dua kementerian/lembaga masing-masing:

- 1) Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti Inovasi Government Award (IGA) **Kategori Kabupaten** dengan nilai 48.50 berada pada peringkat 318 dan masuk pada predikat INOVATIF

- 2) Kementerian Riset dan Teknologi untuk menghitung nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan nilai indeks 2,91 masuk pada kategori SEDANG

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bappelitbangda dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya yang merupakan unsur penunjang di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan, optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan yang bersinergi dari Nasional, Provinsi dan Daerah. Terkait hal tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Barru memiliki fungsi strategis dalam proses pembangunan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai. Adapun Identifikasi masalah berdasarkan sebagai berikut:

Tabel. II.3
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Barru

Urusan	Permasalahan	Penanggung Jawab
Perencanaan	Belum Optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan	Kepala Bappelitbangda Kabupaten Barru
	Koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran SKPD belum optimal	
	Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi belum sinergi, masive dan sistematis	
	Monitoring dan evaluasi yang belum optimal	
	Koordinasi dalam upaya penataan peraturan masing kurang sinergi dengan OPD utama	
Penelitian dan Pengembangan	Fungsi kelitbangan belum optimal	
	Kurangnya hasil penelitian dan pengembangan pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pengembangan daerah	

	Kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi yang menjadi penting, untuk menunjang aktivitas kinerja dalam penyusunan dokumen hasil-hasil penelitian yang lebih terarah dan terukur	
	Belum optimalnya upaya fasilitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah.	

Berdasarkan analisis permasalahan yang diperoleh dari perencanaan, penelitian dan pengembangan kabupaten barru, serta dinamika peraturan perundang-undangan dan dinamika pembangunan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam proses perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah yang dihadapi Bappelitbangda Kabupaten Barru, yang antara lain:

Tabel II.4
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketersediaan data yang belum akurat	Ketersediaan Data akurat yang kurang memadai	Lemahnya dalam menganalisis data Perbedaan data dan Informasi
2.	Koordinasi yang belum optimal	Belum optimalnya koordinasi internal	Analisis Perencanaan belum optimal dalam mengarahkan pada pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah.
3.	Monitoring dan Evaluasi belum optimal	Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan belum optimal	Ketersediaan analisa dan rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capain kinerja belum ada.
4.	Pemanfaatan hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah belum optimal.	Pelaksanaan penelitian belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah.	Kualitas dan kuantitas SDM dan fasilitas pendukung belum memadai.
5.	Pemanfaatan Inovasi daerah belum optimal	Pelaksanaan Inovasi daerah belum optimal	Pendampingan dan evaluasi dari keberlanjutan Inovasi belum optimal.

2.3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026. Proses telaahan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappelitbangda yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Barru sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barru. Visi pembangunan daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 adalah :

“Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Barru diatas adalah sebagai berikut :

Sejahtera adalah Kondisi dimana masyarakat Barru hidup makmur dan sejahtera baik secara ekonomo maupun sosial.

Mandiri adalah Kondisi dimana Kabupaten Barru mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya dengan tetap mengedepankan prinsip keterlibatan peran multisektor untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan kabupaten Barru

Berkeadilan adalah Kondisi ideal dimana Dampak Pembangunan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal di belakang.

Bernafaskan Keagamaan adalah Koondisi ideal dimana seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dalam proses maupun hasil yang diharapkan.

Adapun misi sebagai berikut :

Misi	
Misi 1 :	Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
Misi 2 :	Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal

Misi 3 :	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal
Misi 4 :	Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
Misi 5 :	Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan
Misi 6 :	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi
Misi 7 :	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Berdasarkan misi kepala daerah, Bappelitbangda sebagai urusan penunjang menitikberatkan perannya dalam pencapaian Misi Ke-Enam yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi”**.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bapeeda untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai urusan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong, antara lain :

Tabel II.5
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru

No.	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1.	Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.	Keterlibatan unsur perencana dan penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
2.	Belum optimalnya sistem database dan belum optimalnya monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan.	Telah terbentuknya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Koordinasi tim antara bidang-bidang perencana dengan OPD koordinasinya.
3.	Dinamika Perundang-undangan.	Rapat koordinasi teknis pembangunan daerah tingkat Nasional dan tingkat Provinsi dalam rangka sinkronisasi sasaran dan prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah

2.3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Perencanaan pembangunan daerah mempunyai tujuan tertentu yang dituangkan dalam sasaran pembangunan atau indikator-indikator pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dan strategi daerah yang digunakan maka perlu dikomunikasikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dukungan tentang apa yang harus diperankan pusat dan provinsi untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah tersebut sangat penting. Tantangan utama adalah menyelaraskan program dan kegiatan dalam RPJMD/RKPD dengan RPJMN/RKP. Untuk ini perlu adanya komunikasi perencanaan pembangunan yang intensif antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yang dikoordinir oleh Bappelitbangda dengan Bappenas dan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilakukan dengan menugaskan jabatan fungsional perencana (JFP) baik yang berada di pusat maupun daerah. Selain itu, kedudukan Bappenas sebagai Kementerian Pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Nasional baik pusat dan daerah akan memperkuat komunikasi tersebut. Kebijakan koordinasi dalam pelaksanaan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah melalui:

1. Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang berfungsi mengintegrasikan platform perencanaan dan penganggaran untuk mendukung efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan nasional
2. Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SGDs).
3. Satu Data Indonesia
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
5. Musrenbang Kabupaten, Provinsi dan Nasional
6. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang)

Penelaahan dokumen Renstra Kementerian dan Provinsi Sulawesi Selatan di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barru menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan yaitu keselarasan dokumen antara tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Telaah dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Renstra Bappenas, Kemendagri maupun Renstra Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait langsung dengan Pelayanan Bappelitbangda

Kabupaten Barru.

2.3.3.1. Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 4 (dua) sasaran strategis dalam Renstra 2020-2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
2. Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional.
3. Terwujudnya kenijakan pembangunan nasional yang visioner.
4. Terwujudnya kinerja Kementrian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 maka dapat ditelaah sebagai berikut:

- Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2024 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada salahsatu sasaran pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 **yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.**
- Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

2.3.3.2. Review Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 telah menetapkan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, maka Bappelitbangda Kabupaten Barru memiliki kontribusi yang cukup besar yang akan dilakukan dengan mendukung beberapa kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri antara lain:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa;
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi dan;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam negeri.

Tabel II.6
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru Berdasarkan Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Menegah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Renstra Bappenas			
a.	% Keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencanan kerja K/L dan Daerah	Sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah yang belum optimal	Perbedaan Periode waktu Perencanaan berpengaruh terhadap perencanaan di daerah	Dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang baik di Kementrian memudahkan koordinasi.
2.	Renstra Kemendagri			
	% Pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan pelayan publik	Pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi belum dioptimalkan sebagai rekomendasi kebijakan Pemerintah Kabupaten	Belum Optimalnya Koordinasi untuk memaksimalkan hasil-hasil penelitian dan inovasi untuk kebutuhan perencanaan	Dukungan Pemerintah Pusat terhadap penerapan penelitian dan inovasi dalam pembangunan dan pengembangan daerah

2.3.3.3. Review Rencana Strategis Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara melaksanakan tugas jangka waktu tahun 2018-

2023 telah menetapkan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Dalam mendukung pencapaian Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, maka Bappelitbangda Kabupaten Barru memiliki kontribusi yang cukup besar yang akan dilakukan dengan mendukung beberapa kebijakan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan;
3. Peningkatan kualitas integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan antar tingkatan pemerintahan;
4. Peningkatan kualitas pengumpulan, penyajian dan pengamanan data dan informasi guna mengoptimalkan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta pengkajian kewilayahan;
5. Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pendanaan hingga evaluasi.
6. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi perumusan kebijakan pemerintah daerah.

Tabel II.7
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru Berdasarkan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Menegah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan			
a.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	Belum Optimalnya Sinkronisasi Perencanaan Program tingkat Provinsi dan Kabupaten	Data mikro penunjang perencanaan berbasis kawasan (Kecamatan) masih terbatas.	Terciptanya komitmen antara Prov dan Kabupaten.
b.	Meningkatnya hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan	Masih rendahnya kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perencanaan pembangunan	Belum Optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai	Setiap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan

	pembangunan dan pengembangan inovasi daerah	daeah	rekomendasi bagi OPD Kabupaten Barru dalam menyusun Dokumen Perencanaan	pengembangan harus melalui Bapedda.
--	---	-------	---	-------------------------------------

2.3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.3.4.1. Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru

Dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2021-2026, sesuai dengan ketentuan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031. Memperhatikan arahan RTRW Kabupaten yang merupakan acuan pemanfaatan ruang, maka Bappelitbangda Kabupaten Barru sebagai pelaksana urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan mempunyai peran dalam menyesuaikan pelaksanaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

2.3.4.2. Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Barru

Pemerintah Kabupaten Barru dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah merumuskan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap RPJMD 2021-2026 yang dilakukan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dalam penentuan program dan kegiatan yang berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan, pada penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Barru terdapat Indikator yang menjadi kewenangan Bappelitbangdaialah sebagai berikut:

Tabel II.8
Tabel Indikator TPB Bappelitbangda

NO. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Satuan	Target (PERPRES 59/2017)
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Persentase Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	Menurun Menjadi 7-8 %
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Meningkat
		PDB per kapita		Meningkat

NO. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Satuan	Target (PERPRES 59/2017)
				menjadi lebih dari Rp 50 juta
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)		Ada
		Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)		Ada

Tabel II.9
Faktor Penghambat dan Pendorong Terkait Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru Ditinjau dari Keterlibatan RTRW dan KLHS

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Keterlibatan RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas dan fungsi Bappelitbangda pada peran koordinasi	Dokumen RTRW belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan	Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Barru
2	Keterlibatan KLHS	- Belum Optimalnya pengawalan program dan kegiatan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan - Data pendukung	Dinamika Perundang-undangan.	Regulasi tentang KLHS yang mewajibkan untuk penyusunan dokumen KLHS setiap dokumen perencanaan

2.3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Bappelitbangda Kabupaten Barru senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu,

perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bappelitbangda Kabupaten Barru dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis Bappelitbangda Kabupaten Barru dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu :

- a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Sasaran Jangka Menengah pada Resntra K/L;
- c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat daerah; dan
- e. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah.

Adapun review singkat dari aspek-aspek dalam perumusan isu-isu strategis sebagaimana yang telah disajikan sebagai berikut:

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

- a. Gambaran pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru;
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui hampir keseluruhan target di dalam renstra Bappelitbangda telah tercapai. Namun demikian tantangan perencanaan kedepan akan lebih dinamis sehingga Bappelitbangda harus dapat merumuskan strategi yang tepat dalam rangka menghadapi tantangan tersebut.
- b. Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas;
- Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Indikator Sasaran strategis dalam Renstra Bappenas yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan Bappelitbangda adalah keselarasan rencana pembangunan nasional dengan Rencana KerjaK/L dan Daerah. Yang berarti bahwasanya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh

Bappelitbangda Kabupaten Barru akan berdampak pada penyusunan nasional.

- Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri Indikator Sasaran strategis dalam Renstra Kemendagri yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan Bappelitbangda adalah persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.
- c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru;
Secara umum berdasarkan Renstra yang ingin diraih dalam jangka menengah adalah kualitas perencanaan dan hasil penelitian yang dapat diterapkan dalam kebijakan.
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru;
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru;
Implikasi dari KLHS adalah Bappelitbangda dalam menyusun perencanaan harus melakukan kajian Lingkungan Hidup, disebabkan dalam perencanaan pembangunan harus melihat perencanaan mana saja yang dapat memberikan dampak atau resiko bagi lingkungan.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas data dengan memanfaatkan satu data berbasis teknologi modern;
2. Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah;
3. Membangun koordinasi antar bidang dan memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dan fasilitas pendukung

penelitian dan pengembangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah; dan

5. Mendorong ASN aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan 1 OPD 1 Inovasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Bappelitbangda dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bappelitbangda, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Bappelitbangda berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2025. Review meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Bappelitbangda.

Rekapitulasi hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 untuk program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Barru dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.10
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Bappelitbangda Kabupaten Barru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Level 3	3.424.883.846	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Level 3	3.695.333.846	
			Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL		
I.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	2.898.685.854	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	3.157.685.854	
I.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2.898.685.854	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.157.685.854	Penambahan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN menyesuaikan dengan PP No. 5 Tahun 2024
I.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan Kualitas SDM	100%	3.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan Kualitas SDM	100%	3.000.000	
I.2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Barru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Barru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3.000.000	
I.3	Administrasi		Persentase	100%	193.496.400	Administrasi		Persentase	100%	193.496.400	

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Umum Perangkat Daerah		pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			Umum Perangkat Daerah		pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			
I.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Barru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.033.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Barru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.033.000	
I.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.171.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.171.400	
I.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Barru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.786.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Barru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.786.000	
I.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Barru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.940.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Barru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.940.000	
I.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.680.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.680.000	
I.2.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Barru	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Barru	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000	
I.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88 Laporan	159.886.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88 Laporan	159.886.000	
I.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	183.170.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	183.170.400	

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.4.1	Pengadaan Mebel	Barru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	105 Unit	120.000.000	Pengadaan Mebel	Barru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	105 Unit	120.000.000	
I.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Barru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	63.170.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Barru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	63.170.400	
I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	111.006.192	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	111.006.192	
I.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Barru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	52.206.192	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Barru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	52.206.192	
I.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Barru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	58.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Barru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	58.800.000	
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	35.525.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	46.975.000	
I.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Barru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	15.025.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Barru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	26.475.000	Penambahan anggaran 1 unit kendaraan dinas operasional roda 4 dari 7 Unit menjadi 8 Unit diperuntukkan untuk pemeliharaan kendaraan operasional

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Sekretaris
I.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Barru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	13.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Barru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	13.500.000	
I.6.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Barru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	7.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Barru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	7.000.000	
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu	100%	553.555.500	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu	100%	553.555.500	
			Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD	100%				Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD	100%		
II.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai peraturan perUUan	100%	466.106.500	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai peraturan perUUan	100%	466.106.500	
II.1.1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Barru	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	25.350.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Barru	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	25.350.000	
II.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Barru	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	38.005.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Barru	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	38.005.000	

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.1.3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Barru	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	57.735.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Barru	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	57.735.000	
II.1.4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	11 Dokumen	345.016.500	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	11 Dokumen	345.016.500	
II.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan	100%	9.695.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan	100%	9.695.000	
II.2.1	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Barru	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	44 Orang	9.695.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Barru	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	44 Orang	9.695.000	
II.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	77.754.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	77.754.000	
II.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	10 Laporan	19.895.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	10 Laporan	19.895.000	

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Pembangunan			Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Pembangunan			
II.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Barru	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16 Laporan	57.859.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Barru	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16 Laporan	57.859.000	
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	558.039.100	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	558.039.100	
III.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahandan Pembangunan Manusia		Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	64 Rekomendasi / Kajian / Laporan	249.872.300	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahandan Pembangunan Manusia		Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	64 Rekomendasi / Kajian / Laporan	249.872.300	
III.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36 Dokumen	52.375.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36 Dokumen	52.375.000	

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RKPD)					RKPD)					
III.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	12 Laporan	75.516.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	12 Laporan	75.516.000	
III.1.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	39.269.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	39.269.000	
III.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	82.712.300	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	82.712.300	
III.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	24 Rekomendasi / Kajian / Laporan	140.970.800	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	24 Rekomendasi / Kajian / Laporan	140.970.800	

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	32.007.800	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	32.007.800	
III.2.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	37.865.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	37.865.000	
III.2.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	35.176.500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	35.176.500	
III.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	35.921.500	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	35.921.500	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan		Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi	44 Rekomendasi / Kajian / Laporan	167.196.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan		Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi	44 Rekomendasi / Kajian / Laporan	167.196.000	

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kewilayahan		perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun			Kewilayahan		perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun			
IV	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	65.094.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	65.094.000	
IV.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	69.907.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	69.907.000	
IV.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21 Dokumen	14.270.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21 Dokumen	14.270.000	
IV.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	17.925.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Barru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	17.925.000	

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah Bidang Kewilayahan					Daerah Bidang Kewilayahan					
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Nilai Indeks Inovasi Daerah	≥ 60,25 Poin	183.485.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Nilai Indeks Inovasi Daerah	≥ 60,25 Poin	183.485.000	
IV.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	112.120.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	112.120.000	
IV.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	59.295.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	59.295.000	
IV.1.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	52.825.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	52.825.000	
IV.2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	100%	71.365.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	100%	71.365.000	
III.2.1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode	1 Laporan	71.365.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	Barru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode	1 Laporan	71.365.000	

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan adalah Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dan Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tingkat Kecamatan tahun 2024, tidak terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2025 yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Barru, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel II.11
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Bappelitbangda Kabupaten Barru

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam mendukung kebijakan perencanaan nasional Tahun 2025, Bappelitbangda Kabupaten Barru sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang urusan perencanaan memiliki tugas pokok sebagai penyusun kebijakan/pengambil keputusan, think-tank, koordinator dan administrator di daerah. Dukungan tersebut berupa penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 melalui pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan serta pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Bappelitbangda Kabupaten Barru berperan menjamin sinergitas perencanaan di daerah dengan yang ada di pusat untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang ditentukan khususnya pada program prioritas sesuai urusan pemerintahan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bappelitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Barru dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Bappelitbangda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021-2026.

Visi dan misi Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Barru yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020. Visi Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 adalah:

“Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan”

- 1. *Sejahtera*** adalah Kondisi dimana masyarakat Barru hidup makmur dan sejahtera baik secara ekonomo maupun sosial
- 2. *Mandiri*** adalah Kondisi dimana Kabupaten Barru mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya dengan tetap mengedepankan prinsip keterlibatan peran multisektor untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan kabupaten Barru.
- 3. *Berkeadilan*** adalah Kondisi ideal dimana Dampak Pembangunan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal di belakang
- 4. *Bernafaskan Keagamaan*** adalah Kondisi ideal dimana seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dalam proses maupun hasil yang diharapkan

Visi di atas menjelaskan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Barru melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yaitumisi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagitujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 adalah :

- MISI 1 : Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
- MISI 2 : Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal
- MISI 3 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal

MISI 4 : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

MISI 5 : Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan

MISI 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi

MISI 7 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama

Adapun keterkaitan antara visi dan misi kepala daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III.1
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Barru

VISI	POKOK VISI	MISI
Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan	Sejahtera	Kondisi dimana masyarakat Barru hidup makmur dan sejahtera baik secara ekonomo maupun sosial
	Mandiri	Kondisi dimana Kabupaten Barru mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya dengan tetap mengedepankan prinsip keterlibatan peran multisektor untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan kabupaten Barru
	Berkeadilan	Kondisi ideal dimana Dampak Pembangunan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal di belakang
	Bernafaskan keagamaan	Kondisi ideal dimana seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dalam proses maupun hasil yang diharapkan

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rencana strategis, maka Bappelitbangda menetapkan dua tujuan dan tiga sasaran strategis disertai dengan indikator tujuan dan sasaran yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Bappelitbangda dalam lima tahun ke depan, yaitu:

Tujuan : Mewujudkan Perencanaan dan Pengembangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi hasil (T1)

Indikator Tujuan: Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai SAKIP Kabupaten Barru

Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai SAKIP berdasarkan

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada sub komponen dokumen Perencanaan Strategis dan sub komponen dokumen Perencanaan kinerja Tahunan. Penilaian pada masing-masing sub komponen meliputi 1) pemenuhan, 2) kualitas, dan 3) implementasi.

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan Daerah (S1)

Indikator Sasaran : Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)

IPPD selain digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan rencana pembangunan pada tingkat kabupaten, dapat pula digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan perencanaan pada tingkat Perangkat Daerah.

IPPD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola perencanaan daerah dalam periode tertentu. Dimensi Indeks adalah suatu besaran yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran IPPD.

IPPD ini diukur berdasarkan 3 (tiga) dimensi yaitu:

1. Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Definisi : Bauran program Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran program dalam RKPD baik antar waktu, antar ruang, antar fungsi.

Diukur dengan melihat:

- keselarasan sasaran program RKPD dengan RPJMD
- keselarasan sasaran program Renja dengan RKPD
- keselarasan sasaran program Renstra dengan RPJMD
- keselarasan sasaran program Renja dengan Renstra

2. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Definisi : Keterpaduan dukungan anggaran untuk mencapai sasaran Kegiatan dalam RKPD dan Renja baik antar waktu, antar ruang, antar fungsi.

Diukur dengan melihat:

- kegiatan pada RKPD yang masuk dalam APBD
- kegiatan pada Renja Perangkat Daerah yang masuk dalam DPA Perangkat Daerah

3. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

Definisi : Keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran PN, PP, KP dalam RKP dan pencapaian sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi.

Diukur dengan melihat:

- kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP dalam RKP
- kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP prioritas dalam RKPD Provinsi
- kegiatan prioritas Renja Perangkat Daerah yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP prioritas dalam Renja K/L
- kegiatan prioritas Renja Perangkat Daerah yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP prioritas dalam Renja Perangkat daerah Provinsi

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya pengembangan daerah yang visioner (S2)

Indikator Sasaran :

1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Definisi : Membandingkan Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terhadap jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah. Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan

2. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

Definisi : Membandingkan jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah terhadap jumlah inovasi yang diusulkan

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Bappelitbangda disajikan dalam table berikut.

Tabel III.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	FORMULA/RUMUS	TARGET TAHUN 2025
1	2	3	4	5
Mewujudkan Perencanaan dan Pengembangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Hasil		Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten	Berdasarkan LHE Kementerian PANRB	≥ 26

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	FORMULA/RUMUS		TARGET TAHUN 2025
1	2	3	4		5
	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah (60)	keselarasan sasaran program RKPD dengan RPJMD	-
				keselarasan sasaran program Renja dengan RKPD	
				keselarasan sasaran program Renstra dengan RPJMD	
				keselarasan sasaran program Renja dengan Renstra	
			Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (20)	kegiatan pada RKPD yang masuk dalam APBD	
				kegiatan pada Renja yang masuk dalam DPA	
			Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat, Provinsi dan Daerah (20)	kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi	
				kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP	
				kegiatan prioritas Renja yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP dalam Renja Perangkat daerah Provinsi	
				kegiatan prioritas Renja yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP dalam Renja K/L	
	Terwujudnya Pengembangan Daerah yang Visioner	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	(Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti / Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah) x 100%	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	FORMULA/RUMUS	TARGET TAHUN 2025
1	2	3	4	5
			berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan	
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	(Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan / Jumlah inovasi yang diusulkan) x 100%	100%
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Berdasarkan LHE Kementerian PANRB	≥ 70 Poin
	Meningkatnya Kualitas Penerapan SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Berdasarkan LHE Kementerian PANRB	≥ 70 Poin

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Barru dalam pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang dirancang Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025 terdiri dari empat program, 14 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.990.413.446,-. Adapun rumusan program dan kegiatan serta dengan sasarnya disajikan dalam table berikut.

Tabel III.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Bappelitbangda Kabupaten Barru

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.990.413.446				4.408.870.524
5	01				PERENCANAAN				4.806.928.446				4.311.579.524
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Level 3	3.695.333.846			Level 3	3.504.691.446
						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		20 JPL				20 JPL	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu		100%	3.157.685.854			100%	3.157.685.854
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Barru	26 Orang/bulan	3.157.685.854	DAU		26 Orang/bulan	3.157.685.854
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan kepegawaian perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu		100%	3.000.000			100%	3.000.000
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Barru	3 Orang	3.000.000	DAU		3 Orang	3.000.000
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		100%	193.496.400			100%	190.024.400

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Barru	1 Paket	5.033.000	DAU		1 Paket	2.033.000
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Barru	1 Paket	11.171.400	DAU		1 Paket	8.171.400
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Barru	1 Paket	3.786.000	DAU		1 Paket	1.786.000
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Barru	1 Paket	6.940.000	DAU		1 Paket	15.400.000
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Barru	1 Paket	1.680.000	DAU		1 Paket	1.180.000
5	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Barru	12 Laporan	5.000.000	DAU		12 Laporan	5.000.000
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Barru	88 Laporan	159.886.000	DAU		117 Laporan	156.454.000
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%	183.170.400			-	-
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barru	105 Unit	120.000.000	DAU		-	-
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barru	4 Unit	63.170.400	DAU		-	-
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	111.006.192			100%	111.006.192

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Barru	24 Laporan	52.206.192	DAU		24 Laporan	52.206.192
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Barru	12 Laporan	58.800.000	DAU		12 Laporan	58.800.000
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		100%	46.975.000			100%	42.975.000
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	7 Unit	26.475.000	DAU		7 Unit	26.475.000
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	34 Unit	13.500.000	DAU		34 Unit	13.500.000
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barru	1 Unit	7.000.000	DAU		1 Unit	3.000.000
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu		100%	553.555.500			100%	370.327.000
						Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD		100%				100%	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai peraturan		100%	466.106.500			100%	286.920.500

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						perUUan							
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Barru	2 Berita Acara	25.350.000	DAU		1 Berita Acara	9.676.000
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Barru	2 Berita Acara	38.005.000	DAU		1 Berita Acara	14.645.000
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Barru	2 Berita Acara	57.735.000	DAU		1 Berita Acara	24.065.500
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Barru	11 Dokumen	345.016.500	DAU		7 Dokumen	238.534.000
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan		100%	9.695.000			100%	7.221.500
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Barru	44 Orang	9.695.000	DAU		44 Orang	7.221.500
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan		100%	77.754.000			100%	76.185.000
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Barru	10 Laporan	19.895.000	DAU		5 Laporan	8.567.000

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Barru	16 Laporan	57.859.000	DAU		16 Laporan	67.618.000
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan		100%	558.039.100			100%	436.561.078
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi/kajian/laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun		64 Rekomendasi / Kajian / Laporan	249.872.300			48 Rekomendasi / Kajian / Laporan	143.357.084
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	36 Dokumen	52.375.000	DAU		24 Dokumen	26.689.124
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Barru	12 Laporan	75.516.000	DAU		12 Laporan	40.369.000
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	12 Dokumen	39.269.000	DAU		8 Dokumen	21.258.160

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						RPJMD dan RKPD)							
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Barru	4 Laporan	82.712.300	DAU		4 Laporan	55.040.800
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rekomendasi/kajian/laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun		24 Rekomendasi / Kajian / Laporan	140.970.800			18 Rekomendasi / Kajian / Laporan	140.159.124
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	12 Dokumen	32.007.800	DAU		8 Dokumen	31.916.444
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Barru	4 Laporan	37.865.000	DAU		4 Laporan	39.199.000
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	6 Dokumen	35.176.500	DAU		4 Dokumen	35.491.680
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Barru	2 Laporan	35.921.500	DAU		2 Laporan	33.552.000
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan	Jumlah		44	167.196.000			33	153.044.870

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	rekomendasi/kajian/laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun		Rekomendasi / Kajian / Laporan				Rekomendasi / Kajian / Laporan	
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	12 Dokumen	65.094.000	DAU		8 Dokumen	70.739.830
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Barru	4 Laporan	69.907.000	DAU		4 Laporan	77.508.000
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Barru	21 Dokumen	14.270.000	DAU		14 Dokumen	1.174.040
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Barru	7 Laporan	17.925.000	DAU		7 Laporan	3.623.000
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				183.485.000				97.291.000
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nilai Indeks Inovasi Daerah		≥ 60,25 Poin	183.485.000			≥ 60,25 Poin	97.291.000
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan		100%	112.120.000			100%	49.522.000

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengkajian Peraturan	pemerintahan dan pengkajian peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan							
5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Barru	1 Laporan	59.295.000	DAU		1 Laporan	22.064.000
5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Barru	1 Laporan	52.825.000	DAU		1 Laporan	27.458.000
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan		100%	71.365.000			100%	47.769.000
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Barru	1 Laporan	71.365.000	DAU		1 Laporan	47.769.000

Tabel III.4

Rumusan Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Bappelitbangda Kabupaten Barru

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	
			2025	2026
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Level 3	Level 3
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya keandalan pelaporan keuangan perangkat daerah		100%	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya efektivitas penyusunan RKBMD perangkat daerah	Penjabaran usulan pada RKBMD dan RKBMDP perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA dan DPPA	100%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya sistem informasi dan pengembangan pegawai	1) Persentase data kepegawaian yang akurat dan up to date	100%	100%
		2) Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan Kualitas SDM	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kondisi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna	Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan	100%	100%
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah lingkup perencanaan tingkat Kabupaten	Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu	100%	100%
		Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD	100%	100%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terwujudnya efektivitas penyusunan dokumen perencanaan	Penjabaran konsistensi target program RPJMD dengan target RKPD	100%	100%
		Penjabaran konsistensi target kegiatan RKPD dengan target APBD	100%	100%
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya layanan data terpadu dan berorientasi kepada pengguna	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi pemerintahan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan data dan informasi pemerintahan daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	
			2025	2026
1	2	3	4	5
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya efektivitas proses pengendalian dan monev pelaksanaan pembangunan	Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dijalankan oleh perangkat daerah	100%	100%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya koordinasi dan sinergitas kebijakan sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terwujudnya koordinasi dan sinergitas kebijakan sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pelaksanaan rekomendasi/kajian/laporan hasil koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	100%	100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terwujudnya koordinasi dan sinergitas kebijakan sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pelaksanaan rekomendasi/kajian/laporan hasil koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	100%	100%
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terwujudnya koordinasi dan sinergitas kebijakan sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan rekomendasi/kajian/laporan hasil koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	100%	100%
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kabupaten Inovatif	Nilai Indeks Inovasi Daerah	≥ 60,25 Poin	≥ 60,25 Poin
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Berkembangnya kelitbangan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100%	100%
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terfasilitasinya perangkat daerah dalam pengembangan inovasi daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025 terumus dalam empat program, 14 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.990.413.446,-. Program dan kegiatan tersebut berpedoman pada RKPD Kabupaten Barru tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tugas pokok dan tupoksi Bappelitbangda Kabupaten Barru sebagai perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang perencanaan. Sementara itu, alokasi anggaran yang digunakan dalam rencana kerja adalah bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Barru yang besarnya berdasarkan pagu indikatif yang telah disesuaikan dengan beban kinerja terhadap program dan kegiatan yang direncanakan.

Rencana kerja dan pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel IV.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 Bappelitbangda Kabupaten Barru

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							4.405.870.524
	5	01				PERENCANAAN							4.308.579.524
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Level 3	3.695.333.846			Level 3	3.501.691.446
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL				20 JPL	
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	3.157.685.854			100%	3.157.685.854
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bul an	3.157.685.854	Barru	DAU	26 Orang/bul an	3.157.685.854
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan Kualitas SDM	100%	3.000.000			100%	3.000.000
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3.000.000	Barru	DAU	3 Orang	3.000.000
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	193.496.400			100%	190.024.400

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.033.000	Barru	DAU	1 Paket	2.033.000
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.171.400	Barru	DAU	1 Paket	8.171.400
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.786.000	Barru	DAU	1 Paket	1.786.000
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.940.000	Barru	DAU	1 Paket	15.400.000
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.680.000	Barru	DAU	1 Paket	1.180.000
	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000	Barru	DAU	12 Laporan	5.000.000
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88 Laporan	159.886.000	Barru	DAU	117 Laporan	156.454.000
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	183.170.400				
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	105 Unit	120.000.000	Barru	DAU	-	-
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	63.170.400	Barru	DAU	-	-
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase pemenuhan	100%	111.006.192			100%	111.006.192

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Urusan Pemerintahan Daerah	layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	52.206.192	Barru	DAU	24 Laporan	52.206.192
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	58.800.000	Barru	DAU	12 Laporan	58.800.000
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	46.975.000			100%	42.975.000
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	26.475.000	Barru	DAU	7 Unit	26.475.000
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	13.500.000	Barru	DAU	34 Unit	13.500.000
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	7.000.000	Barru	DAU	1 Unit	3.000.000
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu	100%	553.555.500			100%	370.327.000
							Persentase rata-rata	100%				100%	

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							capaian kinerja program RPJMD						
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai peraturan perUUan	100%	466.106.500			100%	286.920.500
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	25.350.000	Barru	DAU	1 Berita Acara	9.676.000
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	38.005.000	Barru	DAU	1 Berita Acara	14.645.000
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	57.735.000	Barru	DAU	1 Berita Acara	24.065.500
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	11 Dokumen	345.016.500	Barru	DAU	7 Dokumen	238.534.000
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan	100%	9.695.000			100%	7.221.500
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	44 Orang	9.695.000	Barru	DAU	44 Orang	7.221.500

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	77.754.000			100%	76.185.000
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	10 Laporan	19.895.000	Barru	DAU	5 Laporan	8.567.000
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16 Laporan	57.859.000	Barru	DAU	16 Laporan	67.618.000
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	558.039.100			100%	436.561.078
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	64 Rekomendasi / Kajian / Laporan	249.872.300			48 Rekomendasi / Kajian / Laporan	143.357.084
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	36 Dokumen	52.375.000	Barru	DAU	24 Dokumen	26.689.124

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	12 Laporan	75.516.000	Barru	DAU	12 Laporan	40.369.000
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	39.269.000	Barru	DAU	8 Dokumen	21.258.160
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	82.712.300	Barru	DAU	4 Laporan	55.040.800
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	24 Rekomendasi / Kajian / Laporan	140.970.800			18 Rekomendasi / Kajian / Laporan	140.159.124
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	32.007.800	Barru	DAU	8 Dokumen	31.916.444

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	37.865.000	Barru	DAU	4 Laporan	39.199.000
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	35.176.500	Barru	DAU	4 Dokumen	35.491.680
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	35.921.500	Barru	DAU	2 Laporan	33.552.000
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	44 Rekomendasi / Kajian / Laporan	167.196.000			33 Rekomendasi / Kajian / Laporan	153.044.870
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	65.094.000	Barru	DAU	8 Dokumen	70.739.830
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	69.907.000	Barru	DAU	4 Laporan	77.508.000
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	21 Dokumen	14.270.000	Barru	DAU	14 Dokumen	1.174.040

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	17.925.000	Barru	DAU	7 Laporan	3.623.000
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			183.485.000				97.291.000
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nilai Indeks Inovasi Daerah	≥ 60,25 Poin	183.485.000			≥ 60,25 Poin	97.291.000
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	112.120.000			100%	49.522.000
	5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	59.295.000	Barru	DAU	1 Laporan	22.064.000
	5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah,	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan	1 Laporan	52.825.000	Barru	DAU	1 Laporan	27.458.000

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						Reformasi Birokrasi	Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi						
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	100%	71.365.000			100%	47.769.000
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	71.365.000	Barru	DAU	1 Laporan	47.769.000

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting

- a. Perumusan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.
- b. Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan daerah.
- c. Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025 berpedoman kepada Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 yang penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

- a. Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yaitu tahun anggaran 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- b. Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan telah dilakukan pemuktahiran melalui penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Hasil

pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur selanjutnya dilakukan penginputan pada aplikasi SIPD-RI.

- c. Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Bappelitbangda dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbangda Tahun 2025.
- d. Apabila terjadi rasionalisasi anggaran yang diakibatkan oleh berkurangnya pendapatan daerah yang menyebabkan ketidaksusuaian perencanaan kinerja dengan anggaran maka akan dilakukan penyesuaian terhadap selisih anggaran yang ada dengan cara memfokuskan anggaran pada kegiatan yang memiliki urgensi langsung dengan pencapaian target Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda. Sementara itu, untuk kegiatan yang termasuk penunjang urusan akan dilakukan pengurangan pada target kinerja yang berimplikasi pada pengurangan anggaran. Target kinerja yang telah dikurangi akan direalokasi pada perubahan anggaran tahun 2025 atau pada perencanaan tahun 2025 untuk memenuhi pencapaian target kegiatan periode akhir perencanaan jangka menengah sebagaimana yang telah ditetapkan pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026.
- e. Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja triwulan, semesteran dan tahunan atas pelaksanaan Renja Tahun 2025 dalam rangka pemantauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara efektif dan efisien.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2025, dimungkinkan terjadi perubahan Renja apabila terjadi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025

- b. Perubahan-perubahan yang terjadi akan dirumuskan dalam Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2025.
- c. Renja Bappelitbangda Tahun 2025 menjadi pedoman kerja bagi seluruh ASN lingkup Bappelitbangda Kabupaten Barru sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan tetap berpegang teguh pada core value BerAKHLAK dan senantiasa berorientasi pada peningkatan manajemen kinerja.

Barru, 5 Juli 2024

